

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran obyek penelitian

1. Pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun 2017.

Pemilihan kepala daerah DKI Jakarta dilaksanakan pada tahun 2017, dilaksanakan oleh pelaksana pemilu yaitu KPU dan diawasi oleh Bawaslu sesuai undang-undang pelaksanaan Pilkada yang berlaku. Pilkada DKI Jakarta menjadi salah satu tolok ukur perkembangan demokrasi di Indonesia. Pilkada yang menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia sekaligus indikasi terciptanya calon baru yang dipersiapkan untuk kontestasi yang lebih tinggi daripada Pilkada yaitu Pemilu Presiden.

Pelaksanaan Pilkada di DKI Jakarta tentu menjadi peta persaingan para parpol untuk mencari tau siapa yang dapat menjadi koalisi dan parpol mana saja yang akan menjadi oposisi. Proses pelaksanaan kontestasi Pilkada DKI Jakarta sering menciptakan isu-isu nasional yang dimana isu-isu tersebut akan menjadi salah satu pembahasan dalam pemilihan presiden. Membahas tentang Pilkada DKI yang sangat berdampak kepada perkembangan politik dan demokrasi nasional baik daerahnya yang menjadi pusat negara dan pemerintahan pilkada DKI juga mempunyai sejarah serta fenomena politik yang amat panjang dan menyita perhatian masyarakat Indonesia.

Pemilihan kepala daerah dalam artian gubernur di DKI Jakarta memiliki sejarahnya sendiri. Era orde lama kepala daerah DKI Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden Soekarno. Penunjukan kepala daerah ini tercatat mulai dari kepemimpinan Soewirjo, Daan Jahja, Sjamsuridjal, Soediro dan Soemarno S., Henk Gantung, dan Ali Sadikin. Kepemimpinan Soekarno sebagai presiden waktu itu memang tidak memungkinkan untuk melakukan pemilihan secara langsung kecuali pemilihan presiden. Era orde baru kepemimpinan gubernur di Jakarta tidak banyak berubah kepemimpinan ibu kota tetap dipegang Ali Sadikin melanjutkan kepemimpinan sebelumnya dari era Soekarno hingga tahun 1977. Pergantian kepemimpinan gubernur selanjutnya dipegang Tjokropranolo, kemudian ada Soeprapto, Wiyogo Atmodarminto, Soerjadi Soedirja, dan pada akhir Orde baru ditutup dengan kepemimpinan Sutiyoso di tahun 1997.

Kepala daerah termasuk gubernur di era orde lama adalah jabatan yang proses pemilihannya berdasarkan keinginan

presiden. Orde baru menjadi pembeda kebijakan pemilihan gubernur dari orde sebelumnya yaitu orde lama. Penunjukan pemimpin daerah DKI Jakarta pada saat presiden Soeharto menjabat sebagai presiden melalui proses pemilihan oleh DPRD sesuai UU No.5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan. Mekanisme pemilihan ini dinilai lebih lunak dari pemerintahan orde lama. Penjaringan kepala daerah dilakukan oleh DPRD kemudian nama-nama yang lolos penjaringan diusulkan dan ditetapkan oleh presiden Soeharto. Tetapi banyak pihak yang menilai pemilihan gubernur di masa ini adalah gubernur boneka atau banyak sandiwara dan kepentingan dibalik penunjukan oleh DPRD untuk menjadikan rekomendasi nama menjadi pemimpin daerah DKI Jakarta.

Proses di tingkat DPRD, adalah proses yang berjalan untuk sekedar mencari legitimasi secara formal calon yang diinginkan istana untuk dapat menang dalam Pilkada tersebut. Proses ini diterapkan di semua wilayah di Indonesia. Provinsi-provinsi yang menerapkan program ini termasuk DKI Jakarta, gubernur yang biasanya dilatar belakangi masyarakat sipil diubah menjadi mayoritas dari golongan ABRI yang setidaknya berpangkat jenderal berbintang dua. Corak pemerintahan yang sentralistis menjadi ciri utama pemerintahan orde baru, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Era setelahnya Jakarta mulai menata panggung demokrasi, pada tahun 2007 tepatnya bulan Agustus, Gubernur DKI Jakarta dipilih langsung oleh rakyat, dengan masa jabatan 5 tahun.

Gubernur DKI Jakarta yang menduduki kursi gubernur dengan pemilihan langsung yaitu Fauzi Bowo. Masa jabatan 5 tahun yaitu dimulai dari 7 Oktober 2007- 7 Oktober 2012. Pemilihan Gubernur secara langsung tersebut berlangsung sampai sekarang, dengan silih berganti tongkat kepemimpinan, Jakarta terus mengadakan Pilkada secara bertahap setiap 5 tahun sekali. Dengan terpilihnya Joko Widodo pada tahun 2012 dan hanya bertahan 2 tahun karena mencalonkan diri menjadi Presiden, permulaan konflik pada kasus Gubernur DKI Jakarta non-aktif Ahok dimulai dari kiprahnya sebagai wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Joko Widodo sebagai Gubernur Jakarta. Jabatan yang di tinggal Joko Widodo dilanjutkan Basuki Tjahaja Purnama dari 2014 sampai 2017, dan Djarot Saiful Hidayat yang menjabat sebagai Gubernur hanya 6 bulan, pada 2017 silam KPU DKI Jakarta kembali mengadakan pemilihan Gubernur dengan Anies Baswedan yang terpilih.

2. Peran Kompas.com dalam pemberitaan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017

Kompas Gramedia yang merupakan penyaji berita dan peristiwa terkini di Indonesia mempunyai grup yang bernama Kompas.com. dirintis sejak tahun 1995, yang pada awalnya diresmikan dengan nama Kompas *Online*, adalah sebuah situs web yang berisi berita dari Harian Kompas tetapi dalam media Internet.

Seiring dengan lebih masifnya penggunaan internet di masyarakat dan jangkauan internet yang berangsur membaik, Kompas *Online* berkembang di bawah naungan PT. Kompas Cyber Media (KCM). Sebagai unit bisnis yang baru, Kompas.com telah memiliki tim redaksi sendiri yang mana tim ini memproduksi konten yang berbeda. Hal itu didasari oleh karakter masyarakat yang mempunyai kecenderungan membaca yang berbeda saat di media *Online*.

Pada tahun 2008, Kompas Cyber Media mulai bersinergi dengan grup-grup lain yang terdapat di media Kompas Gramedia untuk menjadikan situs Kompas.com sebagai portal berita yang memuat berbagai format multimedia, selain teks dan video Kompas.com juga hadir dalam berbagai platform digital (*desktop dan mobile site*). Pada tahun ini pula, di tampilkan juga kanal-kanal di halaman Kompas.com. kanal-kanal tersebut memuat berita yang sesuai dengan tema berita dan pengelompokan berita yang memiliki karakter. Hal ini memudahkan para *user* untuk mencari berita yang ingin dibaca sesuai tema di dalamnya. Kanal-kanal berita tersebut antara lain :

- a. Kompas Bola, berisi berita tentang update skor bola, berita tentang tim, maupun isu tentang transfer pemain.
- b. Kompas tekno, memuat berita tentang teknologi-teknologi terbaru, harga gadget terbaru, dan review produk teknologi.
- c. Kompas *entertainment*, menyajikan berita tentang isu selebriti, musik dan hiburan dalam dan luar negeri, dan ulasan film yang tengah ramai di masyarakat.
- d. Kompas *health*, berisi artikel tentang kesehatan, informasi medis terbaru, beserta fitur informasi kesehatan interaktif.
- e. Kompas *female*, berisi tentang informasi seputar dunia wanita dan tips seputar karier, kehamilan, tips belanja dan keuangan.
- f. Kompas properti, menyajikan direktori lengkap properti dan artikel tentang bisnis properti serta artikel tentang rumah, apartemen, dan tempat tinggal.

- g. Kompas *image*, berisi tentang foto berita yang berkualitas dalam resolusi yang tinggi pilihan editor.
- h. Kompas otomotif, menampilkan berita tentang kendaraan, trend kendaraan bermotor, tips merawat kendaraan, dan tips berkendara.
- i. Kompas karier, kanal yang tak hanya berisi tentang direktori lowongan kerja, namun juga *one stop career solution*.

Dalam perkembangannya, Kompas.com juga menciptakan komunitas penulis dengan konsep *citizen journalism* dalam situs Kompasiana. Kompasiana bersifat lebih bebas namun tetap melalui proses penyortiran dalam pemuatannya, dan setiap anggota Kompasiana dapat menawarkan setiap peristiwa, gagasan, serta menyalurkan aspirasi dalam bentuk gambar, tulisan, ataupun rekaman audio dan video. Kompasiana melibatkan juga jurnalis Kompas Gramedia dan para masyarakat, serta pengamat dan peneliti dalam berbagai bidang, hal ini bertujuan untuk memperkaya artikel-artikel dan bahan di dalam Kompasiana. Hal itu juga berdampak pada pemuatan berita, setiap harinya Kompasiana dapat memuat tulisan hingga 400 tulisan, dan membangun komunitas penulis hingga 50.000 anggota.

Tahun 2013, Kompas.com melakukan perubahan di dalam tampilan halaman website menjadi lebih rapih. Fitur baru yang menjadi tampilan web yang lebih personal membuat Kompas.com menyadari bahwa memahami kebutuhan pembaca yang berasal dari kalangan yang beragam. Hal ini yang melatar belakangi Kompas.com menciptakan fitur personalisasi tersebut, agar lebih mudah bagi pembaca untuk membaca berita sesuai dengan kegemaran.

a. Visi & Misi Kompas.com

Kompas.com mempunyai visi dan misi sebagai agen perubahan dalam membangun komunitas Indonesia yang lebih harmonis, toleran, aman, dan sejahtera. Dengan masih mempertahankan Kompas sebagai *market leader* secara nasional dan internasional melalui optimalisasi sumber daya dan sinergi bersama mitra strategis.

b. Logo & Tagline

Tahun 2013 yang merupakan tahun perubahan identitas bagi Kompas.com. Perubahan tidak hanya bisa dinikmati pada halaman web dan portal berita Kompas.com, tetapi juga logo.



1) *Logo Mark*

Kompas.com yang mengambil simbol 2 (dua) segitiga dan seakan tumpang tindih sebagai bentuk representasi panah penunjuk arah yang sejalan dengan value Kompas.com sebagai pedoman berita bagi pembacanya. Perbedaan sudut rotasi di antara kedua segitiga diartikan sebagai kebebasan dalam memilih pandangan dan pendapat bagi pembacanya. Sementara, 3 (tiga) warnadasar dan masing-masing turunannya dimaksudkan untuk menggambarkan beragamnya individu pembaca Kompas.com

2) *Logo type*

Logo yang tertera pada “Kompas.com”, merupakan perpaduan dari dua unsur, yaitu “Kompas” yang menjadi simbol historis serta merupakan bagian dari Kompas Gramedia dan “.com” merupakan identitas bisnis perusahaan sekaligus alamat URL dari portal berita di internet.

3) *Tagline*

“JERNIH MELIHAT DUNIA” Kompas.com mempunyai tagline “jernih melihat dunia” yang berarti bebas dari intervensi dan campur tangan dari pihak luar, serta menjadikan masyarakat/pembaca menjadi lebih netral tanpa di pengaruhi pandangan dari pihak yang menginginkan keuntungan dari berita yang dimuat.

c. *Alamat Kompas*

PT. Kompas Cyber Medi Gedung Kompas Gramedia Unit II Lt. 5. Jl. Palmerah Selatan No. 22 28 Jakarta 10270, Indonesia.62-21 5350377/53699200 62-21 5360678 Redaksi: redaksikcm@kompas.co.id
redaksikcm@kompas.com Iklan: iklankcm@kompas.com

3. Peran Republika.co.id dalam pemberitaan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017

Republika adalah sebuah media cetak nasional yang diciptakan oleh komunitas Muslim bagi publik di Indonesia. Upaya panjang kalangan umat yang berusaha menerbitkan koran tersebut, khususnya para wartawan profesional muda yang telah menempuh berbagai langkah. Hadirnya komunitas Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia dapat menembus pembatas pemerintah untuk penerbitan dan berkembangnya media cetak.

Republika terbit perdana pada tahun 1993 bulan januari tanggal 4. Penerbitan Republika menjadi pergerakan nyata umat Islam. Sebelum pergerakan tersebut terwujud, aspirasi yang berasal dari umat Islam tidak mendapatkan tempat dalam wacana nasional. Kehadiran media tersebut bukan hanya merupakan wadah aspirasi masyarakat Muslim, tetapi juga adanya plurarisme informasi dalam masyarakat. Hal ini melatar belakangi pergerakan antusias umat memberi dukungan, dengan membeli saham Republika.co, menjadikan PT. Abdi Bangsa Tbk sebagai perusahaan media yang *go publick* pertama di Indonesia.

Republika berhasil bertahan dan berkembang dalam kurun waktu 10 tahun, upaya keras menejemen dan seluruh pekerja PT. Abdi Bangsa Tbk untuk menjaga ritme serta berjalanya perusahaan membuahkan hasil yang sesuai ekspektasi. Sejak 1993 sampai 2003 menjadi perjalanan panjang, dimulai dari memberitakan dan pemuatan berita yang dimana Indonesia saat itu sangat sedikit sekali keterbukaan informasi. Sejak awal dibentuk Republika seperti menawarkan inovasi baru dalam dunia media cetak. Awal perjalanan Republika sudah menyabet juara dalam Lomba Perwajaan media cetak, yang mengusung tema desain blok yang pada saat itu tak lazim digunakan sebuah media.

Tahun 1995, Republika kembali menggebrak dunia media cetak. Pembukaan media internet dan menerapkan sistem cetak jarak jauh pertama di Indonesia pada 1997. Penedekatan lain juga dilakukan Republika lewat komunitas-komunitas pembaca lokal. Republika juga menjadi koran pertama yang menerbitkan halaman khusus daerah. Menjadi selalu dekat dengan pembeba dan penulisnya menjadi Republika berkembang, mempunyai komitmen untuk lebih maju dan berkembang menjadikan Republika enggan berhenti dalam perkembangannya dalam menciptakan inovasi baru. Pada tahun 2004, Republika

dikelola PT. Republika Media Mandiri, sementara perusahaan yang dulu menaungi Republika naik menjadi induk perusahaan.

Republika.co sebelumnya bernama Republika *Online*, diciptakan di tahun 1995 tepatnya dua tahun setelah Republika terbit. Republika *Online* merupakan portal berita yang menyajikan informasi berupa teks, audio, dan video yang terbentuk berdasarkan teknologi hipermedia. Dengan kemajuan teknologi dan perkembangan media sosial, Republika menghadirkan fitur baru yang merupakan percampuran media komunikasi digital. Informasi yang ditampilkan diperbarui secara berkelanjutan yang terangkum dalam sejumlah kanal, dan menjadikannya sebuah media yang dipercaya. Adapun kanal yang tersedia di Republika.co tersebut antara lain.

- a. Khazanah, kanal tersebut menyediakan informasi dan berita-berita Islami seperti, Hikmah, Islam Disget, Mualaf, Fatwa, Zis Wakaf, Mozaik, Empowering Indonesia, dan Rumah Zakat.
- b. Sepak bola, kanal tersebut memuat tentang berita tim sepak bola, pertandingan bola, dan isu tentang kepindahan pemain.
- c. Oto tek, menyajikan berita-berita otomotif, dan berita seputar teknologi, seperti perkembangan gadget, laptop, dan teknologi serta otomotif terbaru.
- d. News, kanal ini menyediakan berita yang memuat seputar berita Nasional, Internasional, pendidikan, dan Beacukai.
- e. Inpicture, kanal ini memuat tentang foto-foto pilihan redaktur, dan editor Republika, sekitar Jabodetabek, dan Rana.
- f. Leisure, pada kanal memuat tentang informasi yang memuat sekitar gaya hidup, dan senggang.

4. **Filosofi Republika.co.id**

Status sebagai media *Online* yang telah di bangun dan bertahan belasan tahun silam, Republika.co mempunyai tagline yaitu “jendela umat” yang memiliki arti bahwa Republik.co mempunyai ambisi mengantar masyarakat memasuki era baru media konvergen yang mempengaruhi berbagai perubahan di segala aspek. Hal ini menjadikan Republika.co.id sebagai media umat yang terpercaya dan menitik beratkan kepada hal yang lebih mendamaikan serta universal, damai, cerdas dan profesional. Nilai yang dipegang Republika tersebut disertai dengan keterlibatannya dalam menjaga persatuan dan kesatuan serta kepentingan umat Islam yang *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam).

Jendela umat memiliki arti media yang dikhususkan untuk komunitas Muslim agar memiliki pegangan kebenaran seputar berita yang berada dan dikonsumsi masyarakat umum.

Republika mempunyai tagline yang sejalan dengan prinsip dasar Republika.co.id sendiri :

- 1) Memberi ruang luas bagi *content how to, tips, people, dan services*.
- 2) Mengutamakan berita dan informasi yang interaktif dalam format *citizen journalism*.
- 3) Dekat dengan semua komunitas.
- 4) Santun, ramah serta akrab dengan keluarga.
- 5) Mengutamakan berita dan informasi keislaman.
- 6) Menyeimbangkan *good news* dan *bad news*.
- 7) Menyajikan berita secara ringkas, cepat, dan mudah diakses.

5. Visi dan misi Republika.co.id

Visi

Menjadikan republika.co.id sebagai media umat yang mempunyai integritas serta mengedepankan nilai yang sejuak, toleran cerdas, damai dan profesional. Republika juga mempunyai prinsip keterlibatan menjaga persatuan bangsa tetapi tetap menekankan kepentingan umat Islam yang berdasaryang berdasarkan *Rahmatan lil alamin*.

Misi

- 1) Menciptakan budaya kerja yang sehat transparan.
- 2) Merajut tali persaudaraan dengan organisasi Islam di Indonesia.
- 3) Menciptakan dan menghidupkan sistem manajemen yang efisien, efektif, dan mampu dipertanggungjawabkan serta profesional.
- 4) Menciptakan sistem manajemen yang profesional dan kondusif.
- 5) Mengelola kantor perwakilan sebagai “semi otonomi”
- 6) Mengembangkan mitra usaha Republika di luar pulau jawa.
- 7) Menjadikan induk perusahaan PT. Republika Media Mandiri sebagai “sister company” yang sehat.
- 8) Menjadikan HU Republika sebagai media #ONE.

6. Logo Republika.co.id



7. Alamat Republika

Jl. Warung Buncit No 37 Jakarta Selatan Indonesia 12510
 Phone : +6221 7803747 Fax : +6221 7800649, +6221 7983623 Email : sekretariat@republika.co.id Website: <http://www.republika.co.id/>

B. Temuan data penelitian

1. Berita Pilkada DKI Jakarta 2017 Kompas.com

Tabel 3.3 judul berita Pilkada DKI Jakarta 2017 Kompas.com

No	Judul Berita	Tanggal Dan Waktu Terbit
1	Gerakan Pengawal Fatwa MUI : Selama Ini Tersangka Penistaan Agama Selalu Ditahan	Jumat, 18 November 2016, 12:20 WIB
2	GNPF MUI gelar aksi damai pada 2 desember 2016	Jumat, 18 November 2016, 13:50 WIB
3	Kapolri : Aksi 2 Desember Politis, Bukan Lagi Soal Ahok	Sabtu, 19 November 2016, 15:19WIB
4	Menteri Agama : Apa Masih Perlu Demo Tanggal 2 Desember	Senin, 21 november 2016, 18:57 WIB
5	Ketua Umum PPP Imbau Aksi Unjuk Rasa 2 Desember Tak Perlu Dilaksanakan	Selasa, 22 November 2016, 16:44 WIB
6	Muhammadiyah Menghimbau Warganya Tidak Ikut Demo 2 Desember	Selasa, 22 November 2016, 15:05 WIB
7	Kepala BNPT : Ada Potensi Aksi 2 Desember Disusupi Kelompok Teroris	Senin, 28 november 2016, 16:41 WIB
8	Jokowi : Siapa Bilang Ada Demo 2 Desember? Yang Ada Doa Bersama	Selasa, 29 november 2016, 10:21 WIB

No	Judul Berita	Tanggal Dan Waktu Terbit
9	Naik Panggung, Kapolri Jelaskan Proses Hukum Ahok Kepada Massa	Jumat, 2 desember 2016, 10:30 WIB
10	Massa Doa Bersama Teriakkan “Tangkap Ahok” Saat Rombongan Jokowi Lewat	Jumat, 02 desember 2016, 16:55 WIB
11	Mentri Polhukam Doa Bersama Sabar Tunggu Proses Hukum Ahok	Jumat, 02 Desember 2016, 16:49 WIB
12	Setya Novanto Apresiasi Jokowi Dan Peserta Aksi 2 Desember	Jumat, 02 Desember 2016, 18:41 WIB
13	Prabowo Apresiasi Aksi Doa Bersama Dan Peran Aktif Jokowi	Jumat, 02 Desember 2016, 18:41 WIB
14	Said Aqil : Alhamdulillah, Tuhan Menjaga Indonesia	Sabtu, 03 Desember 2016, 13:25 WIB
15	Polisi Kejar Informasi Upaya Provokasi Massa Doa Bersama Dari Monas Ke DPR	Senin, 05 Desember 2016, 16:42 WIB
16	Cerita Jokowi “Ngotot” Shalat Jumat Bersama Massa Pada Aksi 212	Selasa, 06 Desember 2016, 07:23 WIB
17	Cerita Wiranto Di Balik Payung Biru Presiden Jokowi	Rabu, 14 Desember 2016, 16:20 WIB
18	Mulai Januari 2017, Giliran Ahok Djarot Yang Kunjungi Rumah Warga	Selasa 20 desember 2016, 11:24 WIB
19	Survei Litbang Kompas: Politik Aliran Kembali Naik Di Pilkada DKI 2017	Kamis, 22 Desember 2016, 09:01 WIB
20	Ahok : Bapak Ibu Doakan Agar “Mulut Comberan” Saya Tidak Keluar	Kamis 05 januari 2017, 10:26 WIB
21	Konsolidasi Pilkada DKI Jakarta, Prabowo Kumpulkan 10.000 Kader Gerindra Pada 8 Januari	Jumat, 6 januari 2107, 18:10 WIB
22	Jarni Menangis Saat Anies Dan Prabowo Datang Ke Kampung Aquarium	Sabtu, 7 januari 2017, 13:35 WIB

No	Judul Berita	Tanggal Dan Waktu Terbit
23	Agus : Buat Saya Debat Adalah Sebuah Show	Selasa, 10 Januari 2017, 18:10 WIB
24	Fpi Berencana Kemabali Gelar Aksi 11 Febuari	Kamis 11 januari 2017, 16:00 WIB
25	Sandiaga : Pak Prabowo Tak Minta Mahar, Tetapi Politik Itu Berbiaya	Jumat, 12 januari 2018, 12:37 WIB
26	Anies Lebih Mirip Mario Teguh Sekarang...	Jumat 19 januari 2017, 15:35 WIB
27	Benarkah “Gerilya” Lebih Penting Daripada Debat Seperti Kata Agus	Rabu, 25 januari 2017,18:16 WIB
28	Kata Tim Pemenangan Anies-Sandi Soal Naiknya Elektabilitas Ahok-Djarot	Rabu, 25 Januari 2017, 21:21 WIB
29	Djarot: Kalau Takut Coblos Ahok, Coblos yang di Sebelahnya	Kamis, 26 Januari 2017, 13:36 WIB
30	Sandiaga Mengaku tak Niat Menyerang Saat Bertanya Soal Ahok Ke Silvy	Jumat, 28 Januari 2017, 12:49 WIB
31	KPI Beri Peringatan Tiga Televisi Terkait Pemberitaan Pilkada DKI	Senin, 30 januari 2017, 21:07 WIB
32	Anies : Kejadian 212 Itu Sudah Mengagumkan Dunia	Selasa, 31 Januari 2017, 12:23 WIB
33	Jika Menang Pilkada Satu Putarandjarot Janji Temui Agus Dan Anies	Selasa 31 januari 2017, 20:20 WIB

Tabel berita diatas adalah judul-judul saat akan dilakukan kontestasi pilkada DKI Jakarta tahun 2017 (putaran pertama) dari bulan November, desember 2016 dan januari 2017 sebanyak 33 judul berita. Sumber : www.kompas.com

2. Berita Pilkada DKI Jakarta 2017 Republika.co.id

Tabel 3.4 judul berita pilkada DKI Jakarta 2017
Republika.co.id

No	Judul Berita	Tanggal dan Waktu Terbit
1	Habib Rizieq Jamin Aksi Bela Islam Jilid III Berjalan Super Damai	Jumat, 18 November 2016, 12:28 WIB
2	Kapolri: Kalau Mau Demo Tolong Dibatasi Jumlahnya	Jumat, 18 November 2016, 15:45 WIB
3	Pengamat : Isu Makar Di Ungkap Untuk Gagal Aksi 2 Desember	Rabu, 23 November 2016, 17:36 WIB
4	Benarkah Umat Islam Melakukan Makar Pada 2 Desember?	Jumat 25 November 2016, 12:38 WIB
5	Ini 5 Kesepakatan GNPf-Polri Soal Aksi 2 Desember	Senin 28 November 2016, 22:13 WIB
6	DRP Harap Tak Ada Isu Makar Di Aksi 2 Desember	Selasa, 29 November 2016, 06:13 WIB
7	Imbauan Khofifah Untuk Muslimat NU Soal Aksi 2 Desember	Kamis, 01 desember 2016, 06:55 WIB
8	Peserta aksi damai puji kehadiran Jokowi dan JK	Jumat, 02 Desember 2016, 16:01 WIB
9	Peserta Aksi Damai 212: Kasus Penistaan Agama Harus Dituntaskan	Jumat, 02 desember 2016, 19:03 WIB
10	GNPF-MUI : Kami Harap Ahok Bisa Ditahan	Jumat, 02 desember 2016, 22:14 WIB
11	Pasca 212, Umat Diminta Tetap Kawal Kasus Ahok	Minggu, 04 desember 2016, 19:32 WIB
12	Evaluasi aksi 212, habib rizieq: ada penggebosan habis-habisan	Senin, 05 desember 2016, 00:23 WIB
13	Jokowi ungkap soal payung dan sendal biru saat aksi 212	Selasa, 06 desember 2016, 08:18 WIB
14	GNPF : tahan ahok adalah harga mati	Selasa, 06 desember 2016, 18:21 WIB
15	Bachtiar nasir : peserta aksi 212 marak diintimidasi	Rabu, 07 desember 2016, 18:51 WIB
16	Habibie apresiasi aksi damai 212	Jumat, 09 desember 2016, 14:17 WIB
17	Sudahi Balas Membalas Aksi, Saatnya Perkuat Silaturahmi	Sabtu, 10 desember 2016, 21:17 WIB
18	Diam Bagai Gunung Berapi ('Revolusi Putih7)	Jumat, 30 Desember 2016, 06:00 WIB

No	Judul Berita	Tanggal Dan Waktu Terbit
19	Setelah 212 Dan Fatwa Haram Riba	Sabtu, 31 Desember 2016, 07:50 WIB
20	Pengamat: aksi 411 dan 212 jadi sejarah, isu makar terlalu lebay	Senin, 2 Januari 2017, 06:08 WIB
21	Hadapi Debat, Agus Terima Banyak Masukan Dari Para Pakar	Rabu 11 januari 2017, 06:32 WIB
22	Amien Rais : Kekuatan Islam Tak Boleh Kalah Di Pilkada	Ahad, 15 januari 2017, 09:20 WIB
23	Memilih pemimpin seiman tak melanggar demokrasi	Ahad, 15 januari 2017, 09:40 WIB
24	Umat Islam kalah di pilkada DKI, sulit pertahankan kedaulatan	Ahad, 15 januari 2017, 16:20 WIB
25	Sebut Ahok Boneka Asing, Amien Rais Diminta Banyak Istighfar	Ahad, 15 Januari 2017, 17:19 WIB
26	LSI Kaitkan Anjloknya Suara Anies Dengan Habib Rizieq, Ini Alasannya	Selasa, 17 Januari 2017, 16:05 WIB
27	Dai Harus Bela Umat	Selasa, 17 januari 2017, 14:00 WIB
28	Polmark Beberkan Penyebab Ahok Tak Dipilih Warga DKI	Kamis, 19 januari 2017, 18:31 WIB
29	Paslon Tak Ikut Debat Publik Terkena Sanksi	Jumat, 20 Januari 2017, 16:00 WIB
30	Peluang Menang Satu Putaran, Anies : Lebih Baik Kita Rendah Hati	Jumat, 20 januari 2017, 19:09 WIB
31	Anies Ingin Jakarta Kembali Semarak Acara Keagamaan	Sabtu, 21 januari 2017, 16:42 WIB
32	Habib Rizieq Batal Hadiri Tabligh Akbar Di Lombok	Ahad, 29 Januari 2017, 12:45 WIB
33	'Islam Indonesia Cinta Damai dan Toleran'	Selasa, 31 Januari 2017, 11:34 WIB

Tabel berita diatas adalah judul-judul saat akan dilakukan kontestasi pilkada DKI Jakarta tahun 2017 (putaran pertama) dari bulan November, desember 2016 dan januari 2017 sebanyak 33 judul berita. Sumber : www.Republika.co.id

C. Analisis *Framing* Politik Identitas Pada Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2017 Pada Pemberitaan Kompas.com dan Republika.co.id

1. *Framing* pemberitaan politik identitas pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 pada Kompas.com

Teori *Framing* yang digunakan peneliti, adalah teori Robert N. Entman yang menilai *Framing* dari dua dimensi besar yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek tertentu dalam berita. *Framing* yang banyak dijalankan oleh media yaitu dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain, tentu dengan menonjolkan isu tersebut menggunakan strategi wacana penempatan posisi berita yang mencolok, pengulangan, pemakaian label tertentu, pemakaian grafis, simplifikasi, dan lain-lain. Sebagaimana Entman menyatakan bahwa, *framing* yang pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, rekomendasi, dan evaluasi. Dengan itu 33 judul berita yang berkaitan dengan isu-isu Pilkada DKI Jakarta, khususnya isu di bulan-bulan sebelum Pilkada dimulai peneliti menyeleksi 3 isu yang menonjol dalam pemberitaan Kompas.Com yaitu: a) pemberitaan tanggapan organisasi massa dan elit politik tentang aksi 212 dan unjuk rasa penahanan Ahok, b) pemberitaan tentang sikap presiden Jokowi pada demo 212, c) Frame Penyikapan pasangan calon gubernur dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017.

a. **Frame pemberitaan tanggapan organisasi massa dan elit politik tentang aksi 212 dan unjuk rasa penahanan ahok pada Kompas.com**

1) Kompas.com menerbitkan artikel berita yang berjudul “Gerakan pengawal fatwa MUI : selama ini tersangka penistaan agama selalu ditahan” berita yang dimuat pada tanggal 18 November 2016, pukul 12:20 tersebut berisi 9 paragraf, isi berita tersebut adalah :

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) mendesak Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk segera ditahan. Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri dalam kasus dugaan penistaan agama. "Selama ini tersangka yang terkait pada 156 a selalu ditahan, seperti kasus Arswendo, Lia Aminuddin, Yusman Roy, Ahmad Musadeq," kata Panglima Lapangan GNPF Munarman, di Yayasan AQL, Jakarta, Jumat (18/11/2016).

- a. Identifikasi masalah :** identifikasi kasus dalam berita Kompas.com ini sebagai masalah hukum. Kasus tersebut merupakan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dipermasalahkan masyarakat terkait pernyataanya dalam kunjungan di pulau Pramuka terkait surat Al-Maidah Ayat 51. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) menuntut untuk menahan Ahok. Dalam hal ini Ahok yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh bareskrim polri dalam kasus penistaan agama. Sedangkan menurut GNPF MUI selama ini tersangka yang terkait pasal 156a selalu ditahan.
- b. Interpretasi kausal :** berita ini memposisikan Ahok sebagai aktor dari masalah. Adanya pernyataan terkait kasus penistaan agama tersebut, Ahok yang dikenakan hukuman dengan pasal 156 a. Dalam hal ini panglima lapangan yaitu munarman mendesak untuk memproses hukum Ahok. Menurut munarman meski ahok telah di cekal tetapi ahok masih berpotensi melarikan diri dan menghilangkan barang bukti.
- c. Evaluasi moral :** moral yang terkandung dari berita di atas adalah dengan adanya aksi dzikir dan doa bersama dapat mempersatukan umat, dengan berjalanya aksi tersebut dengan damai mencitrakan bangsa indoneisa yang santun.
- d. Rekomendasi treatment :** rekomendasi Kompas.com dalam kasus ini merupakan aksi damai dengan dzikir dan doa bersama agar memperlancar proses hukum dan menegakan hukum yang menjadikan basuki tjahaja purnama sebagai tersangka segera di selesaikan. Hal ini ditujukan untuk mem*framing* media seolah mempunyai agenda tersendiri kepada Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017.
- 2) Kompas.com menerbitkan artikel berita yang berjudul “**Menko Polhukam Minta Massa Doa Bersama Tunggu Proses Ahok**” berita tersebut dimuat pada tanggal 2 Desember 2016 yang lalu, isi dalam berita tersebut mempunyai 9 paragraf dimana kutipan berita tersebut adalah:
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta

massa yang ber doa bersama di Silang Monas untuk bersabar menunggu proses hukum atas kasus penistaan agama. Kasus itu telah menjadikan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka. "Saat ini kan sudah P21, penyerahan saudara Ahok sebagai tersangka ke kejaksaan sudah selesai. Bahkan kejaksaan sudah menyerahkan ke pengadilan," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (2/12/2016).

a. Identifikasi masalah : identifikasi masalah dalam berita yang dimuat oleh Kompas.com ini sebagai murni masalah hukum. Kasus tersebut merupakan kasus yang ditimpakan kepada Gubernur non-aktif yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan kasus dugaan penistaan agama yang berstatus tersangka. Perkembangan kasus sendiri sudah memasuki gelar perkara P21. Dalam pemberitaan tersebut Kompas.com mengambil pandangan dari menteri Polhukam saat itu yaitu Wiranto yang meminta kepada massa untuk menunggu dan bersabar dalam menyikapi kasus tersebut. Hal itu dirasa massa pemerintah sengaja melambatkan proses hukum Ahok karena dinilai sebagian massa ahok punya potensi menang dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta.

b. Interpretasi Kausal : berita ini mempunyai isi yang menceritakan latar belakang peristiwa yang terjadi dikarenakan atas proses hukum Ahok yang merupakan tersangka kasus penistaan agama. Dengan adanya kasus Ahok tersebut, Wiranto meminta kepada para massa aksi untuk bersabar menunggu proses hukum berjalan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi massa dan mencegah aksi lanjutan dengan massa yang lebih banyak, dengan adanya aksi tersebut berjalanya kontestasi

Pilkada semakin tidak kondusif, pemerintah melalui Wiranto meredakan animo massa dengan tindakan yang terukur agar tetap terlaksananya Pilkada dan menjadi solusi terbaik pada saat itu.

c. Evaluasi moral : penilaian moral dalam pemberitaan diatas adalah, sabar dalam menyikapi kasus hukum yang tengah berlangsung dan dituntut massa aksi pada saat itu, serta penanganan yang objektif sangat

diupayakan agar tidak menjadi keputusan yang salah yang memberatkan sebagian massa lainnya.

d. Rekomendasi treatment : dalam berita tersebut Kompas.com merekomendasikan kasus tersebut agar dikembalikan kepihak yang berwajib menangani kasus tersebut, yang harus diproses secara adil dan objektif serta tidak memberatkan salah satu pihak mengingat yang bermasalah adalah Gubernur yang pasti memiliki pendukung di masyarakat.

- 3) Selasa, 31 Januari 2017 tepat pukul 12:23 Kompas.com menerbitkan artikel/berita yang berjudul “Anies: Kejadian 212 Itu Sudah Mengagumkan Dunia”. Berita yang berisi 9 paragraf tersebut berisi tanggapan Anies tentang aksi 212 yang digelar 2 desember 2016 silam.

Berikut adalah kutipan berita:

JAKARTA KOMPAS.com- Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan bahwa aksi doa bersama 212 pada 2 desember 2016 lalu, merupakan aksi yang mengagumkan dunia. Ketertiban sepanjang doa bersama saat itu membuat dunia melihat Islam Indonesia. “kejadian 212 itu sudah mengagumkan dunia. Kok bisa orang sebanyak itu marah tetapi tetap dzikir, marah tetapi santun, marah tetapi tertip, dimana-mana kala ada yang marah itu biasanya merusak disini malah tertib”, ujar Anies dalam acara peringatan maulid Nabi Muhammad SAW di rumah Abuya KH Saifuddin Amsir, Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Selasa (31/1/2017).

a. Identifikasi masalah: identifikasi masalah dalam pemberitaan tersebut, *frame* yang dilakukan Kompas.com mengenai tanggapan Anies tentang aksi 212. Pada pemberitaan tersebut Anies mencitrakan aksi damai 212 sebagai aksi yang tidak arogan, penuh dengan kekerasan, merusak, tidak tertib, dan mencemari lingkungan dengan sampah. Aksi yang berjalan dengan massa yang banyak tersebut, disebut Anies sebagai aksi yang membanggakan Indonesia di kanca dunia, massa yang banyak menjadi intimidatif pula terhadap pelaksanaan hukum. Tanggapan tersebut dirasa ingin mendapatkan ceruk pemilih muslim yang belum menentukan pilihan.

b. Interpretasi kausal : dalam pemberitaan yang dimuat oleh Kompas.com, peristiwa yang terjadi saat aksi 212

yang beberapa pihak menilai berjalan tertib. Serta memuji umat muslim yang menggelar aksi tersebut dengan saat itu juga. Anies memilih menanggapi aksi tersebut di tanggal 31 Januari 2017, dimana Anies menanggapi berjalan nya aksi 212 sebagai aksi yang mendunia. Dimana banyak massa yang berkumpul secara tertib, dan tidak ada tindak vandalisme.

c. Evaluasi moral : dalam berita diatas penilaian moral yang terkandung di dalamnya yakni, umat muslim yang mengadakan aksi 212 dinilai dapat menjadi tauladan. Aksi yang digelar dan dihadiri banyak massa tetapi tidak ada aksi kekerasan dan hal yang merugikan lainnya. Anies juga berharap jakarta bisa menjadi kota yang lebih beradab dengan momentum aksi 212 tersebut.

d. Rekomendasi treatment : Kompas.com merekomendasikan, dalam aksi yang ditanggapi Anies sebagai aksi yang mendunia, aksi tersebut dinilai akan mengintimidasi berjalannya kasus Ahok dengan dugaan penistaan agama. Hal ini dilakukan agar penahanan Ahok dapat dilakukan dan proses hukum kasus dugaan penistaan agama dapat berjalan cepat. Aksi tersebut dianggapi Anies sebagai hak kebebasan menyuarakan pendapat. Di mana aksi yang berjalan tertib dinilai sebagai “aksi yang tak mudah dilakukan dengan kondisi yang sedang marah tetapi tetap berdzikir” (kata Anies).

b. Frame pemberitaan tentang sikap presiden Jokowi pada aksi unjuk rasa 212

1) Penyikapan Jokowi tentang aksi unjuk rasa 212 muncul pada tanggal 5 Desember 2016 pukul 15:26 yang diterbitkan oleh Kompas.com dengan judul “Dari Payung Hingga Sandal, Apa Makna Biru Bagi Jokowi?” berita artikel ini terdiri dari 9 paragraf berikut adalah kutipan berita:

JAKARTA, KOMPAS.com – Warna biru mendadak dekat sekali dengan sosok Presiden Joko Widodo, akhir-akhir ini. Saat menerobos hujan dari Istana Merdeka ke Silang Monas untuk shalat Jumat bersama massa aksi doa bersama pada Jumat (2/12/2016) lalu misalnya, Jokowi mengenakan payung warna biru. Minggu (4/12/2016) malam, juga demikian. Presiden lagi-lagi memilih warna

biru saat membeli sebuah sandal diskon 50 persen plus 20 persen saat jalan-jalan di E-Walk Balikpapan Superblock. Kedua peristiwa itu menghebohkan linimasa dan mengait-ngaitkan Jokowi dengan Partai Demokrat pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono yang kebetulan memang memiliki lambang partai berlatar warna biru.

a. Identifikasi masalah : identifikasi masalah pada berita yang dimuat Kompas.com adalah dengan kehadiran presiden Jokowi pada aksi damai 212. Kompas.com juga berusaha membingkai pemberitaan tersebut dengan menitik beratkan kepada kehadiran Jokowi yang menggunakan sandal dan payung yang berwarna biru. Penilaian Kompas.com tentang pemuatan berita ini karena dinilai peristiwa tersebut mengemparkan linimasa, dimana dengan warna biru identik dengan partai yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono yaitu partai Demokrat.

b. Intepretasi Kausal : Kompas.com melalui pemberitaan tersebut berusaha membingkai peristiwa yang terjadi saat kehadiran presiden Jokowi yang menggunakan sandal dan payung yang berwarna biru, mengkaitkan peristiwa tersebut dengan salah satu aviliasi politik kepada partai politik yang mempunyai lambang biru yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono yaitu partai Demokrat. Yang dimana berstatus sebagai mantan presiden yang sebelumnya.

c. Evaluasi moral : dalam berita tersebut Kompas.com menggambarkan peristiwa warna biru yang melambangkan perdamaian dalam peristiwa tersebut presiden Jokowi menggunakan sandal dan payung berwarna biru untuk membawa pesan perdamaian, dimana dalam aksi tersebut merupakan aksi damai hal tersebut merupakan pesan moral dalam peristiwa ini.

d. Rekomendasi treatment : adanya payung dan sandal yang digunakan presiden berwarna biru, media sosial tidak terpengaruh dalam dimuatnya berita tersebut. Terlebih lagi isu yang dimuat tersebut erat dengan persaingan politik dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta maupun keberlangsungan partai yang dibawa masing-masing elit politik. Dilihat dari kalimat berita yang dimuat Kompas.com yang mengatakan “peristiwa itu menghebohkan linimasa dan mengait-ngaitkan Jokowi

dengan Partai Demokrat pimpinan Susilo Bambang Yudhoyonoyang kebetulan memang memiliki lambang partai berlatar warna biru. Padahal, tidak hanya Demokrat yang "berwarna biru". Partai Amanat Nasional (PAN) juga berwarna biru”.

- 2) Jokowi juga menyikapi aksi unjuk rasa pada 2 Desember tersebut dimuat Kompas.com dalam artikel berita yang berjudul “**Jokowi : Siapa Bilang Ada Demo 2 Desember? Yang Ada Doa Bersama**” berita yang dimuat pada tanggal Selasa, 29 November 2016, pukul 10:21 WIB berita tersebut terdiri dari 9 paragraf yang berisi:

Jakarta, Kompas.com – presiden Joko Widodo menegaskan, tidak ada aksi unjuk rasa yang akan digelar pada 2 Desember 2016. Menurut Jokowi, yang ada hanyalah kegiatan doa bersama yang dipusatkan di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. “siapa bilang ada demo (2 Desember)? Yang ada doa bersama, baik itu sebelum jumatatan ataupun sesudah jumatatan,” ujar Jokowi di silang Monas, jakarta, selasa (29/11/2016).

jokowi meminta wartawan jangan menyebarkan isu yang tidak-tidak terkait hal itu. Jokowi menegaskan menegaskan sekali lagi bahwa tidak adanya aksi unjuk rasa merupakan kesepakatan antara Polri dan sejumlah elemen masyarakat yang dijalankan bersama. “karena komitmen yang ada adalah doa bersama. Doa bersama. Bukan demo” ulang jokowi.

a. Identifikasi masalah : masalah pada berita tersebut adalah kesepakatan aparat kepada sejumlah elemen masyarakat mengenai aksi yang akan digelar 2 Desember presiden Jokowi menanggapi aksi tersebut sebagai doa bersama bukan aksi unjuk rasa, ketegasan dalam berita tersebut sengaja dimunculkan karena mencegah pengalihan fokus aksi yaitu untuk berdoa bersama bukan untuk unjuk rasa. Langkah tersebut diambil Jokowi untuk meredam masyarakat untuk menahan Ahok, karena mengingat Jokowi berasal dari partai yang sama yang mengusung Ahok dalam Pilkada.

b. Intepretasi kausal : melalui berita tersebut Kompas.com membingkai bagaimana presiden Jokowi menyikapi aksi damai yang dilakukan pada 2 Desember tersesebut. Dalam hal ini presiden menegaskan bahwa aksi

yang dilakukan massa pada 2 Desember 2016 mendatang merupakan dzikir dan berdoa bersama, penyikapan presiden Jokowi tersebut memberi kesan kepada masyarakat bahwa keadaan pemerintah sedang dalam keadaan yang terkendali. Tujuan Jokowi menyikapi dengan demikian juga karena menjaga kedamaian antar elemen masyarakat agar tak terjadi konflik yang tidak diinginkan di tengah kontestasi politik yang sedang berjalan yaitu Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 mendatang.

c. Evaluasi moral : nilai moral dalam berita yang di muat Kompas.com adalah, bahwa aksi pada 2 desember bukanlah aksi unjuk rasa, melainkan aksi damai yang dilakukan sebagai elemen masyarakat Indonesia di isi dengan berdzikir dan berdoa. Dikarenakan sebagian elemen masyarakat yang menggelar aksi damai pada 2 Desember mendatang sudah membuat kesepakatan untuk tidak menjadikan aksi tersebut sebagai aksi unjuk rasa melainkan doa bersama di Lapangan Silang Monas.

d. Rekomendasi treatment : dalam berita tersebut Kompas.com, merekomendasikan bahwa aksi yang digelar sebagai aksi damai dikhawatirkan akan menjadi aksi anarkis yang merugikan semua pihak. Jokowi pula menyadari posisinya sebagai presiden yang sangat penting untuk meredam semua gelombang berita provokasi menjelang Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Jokowi juga mengingatkan integritasnya sebagai Presiden dengan lebih memilih jalan yang damai dalam menyikapi aksi 2 desember 2016 tersebut. Dengan menyebutnya sebagai aksi berdoa dan berdzikir bersama aksi pada 2 Desember tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan oleh elit dan masyarakat sipil lainnya.

- 3) 6 Desember 2016, tepatnya hari selasa pukul 07:23 Kompas.com menerbitkan berita yang berjudul “Cerita Jokowi “Ngotot” Shalat Jumat Bersama Massa Pada Aksi 212”, berita yang terdiri dari 12 paragraf tersebut berisi tentang Jokowi yang memaksa mengikuti aksi unjuk rasa pada 2 Desember. Berikut adalah kutipan berita tersebut.

Jakarta, Kompas.com- Momen Presiden Joko Widodo shalat Jumat bersama massa aksi doa bersama pada Jumat (2/12/2016) lalu belum habis diperbincangkan. Staf khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopriowomempunyai cerita di balik momen yang

dikenal dengan aksi 212 itu. pada acara “satu meja” di Kompas tv, senin (06/12/2016) malam, ia menceritakan kembali momen mengejutkan tersebut.

“sebenarnya ada beberapa saran dari pembantu presiden untuk tidak hadir, sekali lagi karena faktor keamanan” ujar Johan kepada pembawa acara Budiman Tanuredjo. Namun, Jokowi bersih keras tetap ingin melaksanakan shalat jumat bersama

jutaan orang. Bahkan saat detik-detik Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla hendak jalan kaki ke silang Monas, para pembantunya kembali mengingatkan untuk tidak kesana.

a. Identifikasi masalah : Presiden Jokowi yang ngotot untuk hadir dalam aksi pada 2 Desember tersebut, yang menurut staf khusus Presiden bidang komunikasi menyampaikan bahwa Presiden pada saat itu sudah di ingatkan para pembantunya untuk tidak hadir dalam unjuk rasa tersebut. Namun Presiden Jokowi tetap bersih keras untuk menghandiri aksi dan shalat jumat bersama jutaan massa yang mengikuti aksi tersebut. Bahkan saat sedang dijalan para ajudan dan pembantunya terus mengingatkan Jokowi untuk mengurungkan niat hadir di aksi massa itu, karena selain alasan keamanan keadaan lapangan unjuk rasa tersebut sedang diguyur hujan.

b. Interpretasi kausal : dari berita yang diterbitkan, Kompas.com membingkai berita tentang sikap Presiden Jokowi yang tetap ngotot untuk menemui para massa aksi walaupun sudah dilarang pembantunya untuk tidak menghadiri acara aksi tersebut. Dalam hal ini Kompas.com berusaha membingkai tentang sikap Jokowi saat unjuk rasa berlangsung. Dengan menonjolkan bahwa dengan alasan hujan dan keamanan masa seakan di suguhkan aksi tersebut sebagai aksi yang langkah dilakukan para pejabat.

c. Evaluasi moral : moral yang terkandung dalam berita tersebut adalah Presiden Jokowi yang tetap bersih keras dengan keadaan yang kurang memungkinkan untuk menemui para masa aksi, walaupun sudah dilarang para pembantunya dan para menteri. Tetapi Presiden tetap memutuskan untuk menemui para masa aksi pada 2 desember 2016.

d. Rekomendasi treatment : Kompas.com merekomendasikan bahwa penyikapan Jokowi untuk datang dan menemui masa

dalam aksi 2 Desember. Hal ini memberikan pernyataan tegas Jokowi kepada sebagian elemen masyarakat yang menggelar aksi tersebut bahwa pemerintah tidak memihak kepada siapapun dimata hukum. Aksi yang dilakukan Jokowi pada aksi tersebut pula banyak menyita perhatian sebagian masyarakat yang lain. Sikap Jokowi yang bersih keras untuk menemui masa aksi tersebut, di sampaikan langsung oleh Johan budi staf khusus kepresidenan bidang telekomunikasi dalam wawancara yang ditayangkan oleh KompasTV pada acara Satu Meja.

c. Frame Penyikapan pasangan calon gubernur dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017

1). Pada tanggal 5 januari Kompas.com menerbitkan suatu artikel di website berita *Online* mereka yang berjudul “Ahok : Bapak ibu Doakan “Mulut Comberan” Saya Tidak Keluar” artikel yang berisi 8 paragraf tersebut berisi tentang Ahok yang meminta doa masyarakat pendukungnya agar ucapan yang tidak pantas keluar saat berlangsungnya debat. Berikut adalah kutipan berita:

JAKARTA, KOMPAS.com – calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali menemui warga dan pendukungnya di rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2017). Markas pemenangan Ahok dan Djarot Saiful Hidayat itu dipenuhi para pendukung yang mengenakan baju kotak-kotak.

Pada kesempatan tersebut, Ahok meminta doa agar debat perdana Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta pada 13 Januari mendatang berjalan dengan lancar. Selain itu, ia berharap dapat mengendalikan diri ketika berhadapan dengan dua pasangan calon lainnya.

“Tolong bapak dan ibu doakan saya supaya bisa mengendalikan diri pada debat 13 Januari nanti. Doakan saya agar mulut comberan saya tidak keluar”, kata Ahok. Ia yakin pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, akan menyerangnya diatas panggung debat nanti, terutama mengenai karakter Ahok.

a. Identifikasi masalah : Ahok yang meyakini bahwa dalam debat yang akan digelar KPU pada 13 januari mendatang,

kedua pasangan calon akan menyerangnya. Ahok meminta doa para masyarakat pendukungnya, agar perkataan yang tidak pantas tidak keluar dari mulutnya pada debat nanti. Selain hal itu, Ahok juga menghawatirkan bahwa nanti dalam forum debat, para pasangan calon lainnya menyerang mengenai karakternya bukan tentang *track record* sebagai petahana dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Karena kekhawatiran tersebut Ahok meminta doa para pendukungnya tepatnya di rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, pada hari Kamis (5/1/2017).

b. Intepretasi kausal : dalam berita yang dimuat oleh Kompas.com tersebut membingkai berita seolah-olah Ahok akan diserang oleh lawan politiknya. Debat yang diadakan oleh KPU pada 13 Januari mendatang menjadi hal yang diantisipasi oleh Ahok mana kala lawan politiknya lebih menyerang ke sektor kepribadiannya. Dengan hal itu Ahok meminta doa kepada para pendukungnya di rumah Lembang agar ucapan-ucapan yang kasar dan tidak semestinya keluar disaat debat kandidat berlangsung. Ahok juga mengkhawatirkan apabila debat berjalan bukan karena adu gagasan tetapi menghakimi kepribadiannya.

c. Evaluasi moral : moral yang terkandung dalam berita tersebut adalah, Ahok yang meminta doa pendukungnya agar tidak berbicara secara kasar dan tidak etis saat debat yang diadakan KPU berlangsung. Ahok juga mengkhawatirkan bahwa debat yang berlangsung akan lebih menyerang kepribadiannya daripada beradu gagasan program kerja.

d. Rekomendasi treatment : Kompas.com didalam artikel berita tersebut merekomendasikan tentang sikap Ahok untuk menghadapi debat. Ahok yang notabene mempunyai ciri khas yang lugas dan tegas, serta berbicara apa adanya mempunyai kekhawatiran bahwa banyak yang tersinggung dengan gaya berbicarannya yang sebagian orang menilai arogan dan dan tidak sesuai moral. Dalam hal ini Ahok meminta doa dari para pendukungnya di rumah Lembang agar kata-kata kasar tidak keluar dari mulutnya saat debat berlangsung.

2). Salah satu berita yang diterbitkan oleh Kompas.com, pada tanggal 26 Januari 2017 tepatnya pada hari kamis pukul 13:26 WIB. Berjudul “Djarot: Kalau Takut Coblos Ahok, Coblos yang di sebelahnya” berita/artikel yang berisi 8 paragraf tersebut berisi tentang penyikapan pasangan calon Ahok dan Djarot di bulan januari. Berikut kutipan berita:

JAKARTA, KOMPAS.com- calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Djarot Saiful Hidayat, meminta warga tidak takut memilih Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena beda keyakinan. Dia berseloroh, jika warga takutgambar Ahok saat pemungutan suara nanti, maka warga bisa mencoblos gambar Djarot.“kalau takut banget coblos (Ahok), ya coblos sebelahnya. Boleh nggak? Boleh untuk kerja yang lebih baik.” kata Djarot saat kampanye di jalan Pengadegan Barat XII, RT 07/RW 04 Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2017).

kata “sebelahnya” yang dimaksud adalah gambar foto Djarot. Gambar yang akan dicoblos pada kertas suara pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada tanggal 15 Februari mendatang adalah gambarcagub yang berdampingan dengan gambar cawagubnya, termasuk gambar Ahok dan Djarot. Dalam kampanyenya, Djarot meminta agar warga tidak membeda-bedakan pemimpin berdasarkan ras, suku, agama, dan antar golongan (SARA).

a. Identifikasi masalah : Djarot yang berseloroh untuk tidak takut mencoblos Ahok karena perbedaan suku, ras, dan agama, dengan itu Djarot mengatakan untuk mencoblos gambar dirinya saja bilamana masyarakat takut untuk mencoblos Ahok. Djarot juga menambahkan bahwa memilih gubernur berbeda dengan memilih imam sholat atau memilih pemimpin pesantren, menurutnya memilih gubernur sama seperti memilih pelayan yang melayani masyarakat. Tak masalah berbeda agama, ras, dan golongan dengan mayoritas masyarakat Indonesia, karena hal itu tidak dilarang oleh UUD 1945.

b. Inteprtasi kausal : dalam berita tersebut Kompas.com, Djarot diposisikan sebagai calon wakil gubernur yang mengimbangi Ahok dalam tanda khusus mencoba menjadi penetral ditengah situasi yang tidak menentu di tengah kontestasi pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Djarot meminta masyarakat untuk tidak takut mencoblos Ahok di samping kasus dugaan penistaan agama yang tengah dialami olehnya. Djarot juga menegaskan bahwa tidak ada larangan untuk memilih pemimpin masyarakat yang melayani, berbeda lagi memilih imam sholat dan pemimpin pesantren di mana tidak diperbolehkan berbeda.

c. Evaluasi moral : penilaian moral atas kampanye Djarot yang merupakan calon wakil gubernur jakarta dari petahana

menyasar kaum nasionalis. Di mana masyarakat yang mempunyai penilaian sendiri atas calon yang berbeda dengan mayoritas masyarakat Indonesia. Djarot juga menegaskan bahwa perbedaan ras, suku, dan agama antara mayoritas masyarakat DKI Jakarta yang beragama Islam sedangkan Ahok sendiri mempunyai kasus dugaan penistaan agama yang turut menyertai di tengah kontestasi Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

d. Rekomendasi treatment : Kompas.com merekomendasikan bahwa pemilih yang objektif adalah pemilih yang memilih berdasarkan *track record* dan visi misi pasangan calon. Memilih karena paksaan orang lain adalah suatu kecacatan demokrasi. Kasus yang menjerat Ahok sebagai tersangka bukan kasus korupsi sebagaimana kebanyakan kepala daerah, tetapi kasus yang menyinggung ranah pribadi. Djarot sebagai penetral dan ingin mendapatkan pemilih muslim dan nasionalis, menegaskan bahwa memilih pemimpin daerah yang melayani masyarakat, berbeda dengan memilih imam sholat.

3). Sabtu 28 Januari 2017 tepatnya pukul 12:49 WIB, Kompas.com menerbitkan berita/artikel yang berjudul “Sandiaga Mengaku Tak Niat Menyerang Saat Bertanya Soal Ahok Ke Sylvi” artikel yang berisi 9 paragraf tersebut berisi tentang ketidak sengajaan Sandi mempertanyakan nyang yang seolah-olah menyerang Ahok saat bertanya kepada silvy.

Berikut adalah kutipan berita Kompas.com

JAKARTA KOMPAS.com- calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Sandiaga Uno, menjelaskan maksud pertanyaan dia mengenai kepemimpinan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki tjahaja purnama atau Ahok kepada calon wakil gubernur

DKI Jakarta nomor urut satu, Sylviana Murni. Pertanyaan itu dilontarkan Sandiaga saat debat kedua, Jumat (27/1/2017) mala, di hotel Bidakara.

“Kami tak berniat menyerang sama sekali. Kami ingin lihat diferensiasi gubernur” kata Sandiaga di Menteng, Jakarta Pusat, sabtu (28/1/2017). Sandiaga menjelaskan, pengalaman sylviana puluhan tahun menjadi PNS Pemprov DKI Jakarta bisa menjadi pelajaran. Silvy dinilai mengetahui seluk beluk kepemimpinan di provinsi DKI Jakarta.

a. Identifikasi masalah : pemberitaan yang diterbitkan oleh Kompas.com dengan judul Sandiaga Mengaku Tak Niat

Menyerang Saat Bertanya Soal Ahok Ke Sylvi. Pertanyaan sandiaga yang di tujukan ke silvy yang menyinggung dengan jabatan pelayan publik tidak bermaksud untuk menyerang Ahok yang berstatus sebagai petahana pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

b. Interpretasi Kausal : Kompas.com dalam mengemas pemberitaan tersebut, membingkai peristiwa tersebut dengan pertanyaan Sandiaga yang menyerang salah satu pasangan calon. Sandiaga sendiri, menjelaskan bahwa pertanyaan tersebut diperuntuhkan kepada silvy karena pengalamannya sebagai PNS yang mengetahui seluk-beluk kepemimpinan di DKI Jakarta. Pertanyaan yang menyinggung era kepemimpinan Ahok menjadikan pertanyaan ini sungguh spesifik di tujukan untuk siapa. Sandiaga juga menegaskan dia tak menyerang Ahok yang berstatus sebagai gubernur non-aktif yang didalam kontestasi Pilkada ini menjadi petahana.

c. Evaluasi moral : moral yang terkandung pada berita tersebut yakni, Sandiaga tidak bermaksud menyerang Ahok dalam debat gubernur tersebut. Ini menjaga citra Sandiaga tetap sebagai karakter pemimpin yang halus dan alim, menjadi seorang yang menyerang karakter pribadi dalam forum debat yang sebagai ajang menguji visi dan misi sebagai pemimpin daerah. Hal ini diluruskan Sandiaga, dalam pemberitaan tersebut dimana Sandiaga menjawab bahwa dia tidak bermaksud menyerang karakter ahok saat bertanya kepada silvy. Mengingat bahwa silvy menjadi PNS sudah berpuluh tahun dan mengetahui karakter pemimpin yang selalu berganti memimpin jakarta dengan karakter yang berbeda-beda.

d. Rekomendasi treatment : Kompas.com merekomendasikan bahwa dalam suatu pertanyaan dalam debat ada makna yang tersirat dan lain pengartiannya, pemaknaan masyarakat belum tentu benar adanya. Dalam debat pula harus melihat konteks pertanyaan dan konteks debat.

2. *Framing* berita *Framing* pemberitaan politik identitas pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 pada Republika.co.id

Dari semua berita yang diterbitkan Republika.co.id selama 3 bulan, selama bulan November 2016 sampai Januari 2017 peneliti menyeleksi menjadi 33 judul berita, dan 3 isu menonjol dalam waktu menuju pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Isu-isu yang diseleksi tersebut adalah : a)

Isu makar yang terdapat pada aksi 212 yang terjadi di tengah berlangsungnya kontestasi Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.
 b) proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.c) penyikapan elit politik dan organisasi massa tentang Pilkada DKI Jakarta.

a. Frame isu makar yang terdapat pada aksi 212 yang terjadi di tengah berlangsungnya kontestasi Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

1) Republika.co.id menerbitkan berita yang berjudul "Pengamat : Isu Makar Di Umngkap Untuk Gagalkan Aksi 2 Desember" tepat pada tanggal 23 November 2016 pukul 17:27 WIB. Berita yang berisi 8 paragraf pada berita tersebut. Berita yang berisi tanggapan pengamat politik yang menanggapi *statement* pernyataan jendral Tito Karnavian yang melempar isu makar sebelum aksi 212 dimulai. Berikut kutipan berita :

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang 'melempar' isu makar pada aksi 2 Desember atau 212 dinilai sebagai tekanan kepada umat Islam untuk menghentikan tuntutan keadilannya. Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya mengatakan konsolidasi yang dilakukan Tito kepada banyak komponen umat Islam dimaknai sebagai upaya mereduksi agenda 212 atau memecah kekuatan umat Islam. "Atau targetnya menggagalkan rencana aksi 212," ujarnya kepada Republika.co.id, Rabu (23/11). Menurut dia, langkah-langkah Kapolri tidak menjawab persoalan substansial yang dituntut umat Islam. Langkah Tito justru bisa dimaknai sebagai operasi adu domba antarumat Islam. Dia mengatakan seharusnya Kapolri memastikan rasa keadilan yang dituntut umat Islam itu terealisasi bukan malah sebaliknya membuat konfrontasi secara terbuka.

a. Identifikasi masalah : berita yang diterbitkan oleh Republika.co.id, tersebut teridentifikasi sebagai berita yang berisi isu makar yang terjadi pada aksi 2 Desember 2016. Republika sendiri membingkai berita isu makar tersebut, berdasarkan pernyataan

Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian, yang menyebutkan bahwa ada indikasi makar pada aksi 2 Desember kepada masyarakat. Adanya isu makar tersebut dinilai ada potensi penekanan umat Islam pada berjalanya hukum untuk menghentikan keadilan.

b. Intepretasi Kausal : dalam pemberitaan yang di terbitkan oelh Republika.co.id, bahwa yang menyebabkan isu tersebut adalah, isu adanya rencana makar sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat luas adalah *statement* Kapolri Jondral Tito Karnavian. Dengan hal ini *statement* yang di keluarkan oleh Tito yang menuduh adanya makar di aksi 2 desember, menjadikan tekanan publik untuk masa yang menggelar aksi tersebut menjadi semakin kuat untuk membatalkan aksi 2 Desember tersebut. Republika.co.id membingkai berita tersebut dengan mengambil perspektif dari Harits Abu Ulya yaitu pengamat politik sekaligus direktur di The Company Of Ideological Islamic Analyst (CIIA). Dalam isi wawancaranya Harits mengatakan bahwa konsolidasi yang dilakukan oleh Tito, kepada banyak komponen umat islam yang dimaknai sebagai upaya mereduksi agenda 212 atau bisa juga dimaknai untuk memecah kekuatan umat Islam.

c. Evaluasi moral : dalam berita dan kasus yang dimuat oleh Republika, penilaian moral didalam nya ialah, dengan adanya konsolidasi yang dilakukan Tito yang menyinggung banyak komponen umat Islam, dimaknai sebagai upaya mereduksi agenda 212 atau memecah belah kekuatan umat Islam. Langkah tersebut juga bisa dimaknai sebagai oprasi adu domba yang antar umat Islam. Seharusnya Kapolri diharuskan memastikan memberi rasa keadilan kepada semua lapisan masyarakat, hal tersebut juga bertepatan dengan berjalanya menuju Pilkada, seyogyanya Kapolri memberikan pengertian yang dapat memberi pemahaman kepada masyarakat Islam agar aksi tersebut dapat mengganggu jalanya pilkada kelak. Dan tidak perlu menempuh langkah yang tidak elegan seperti konfrontasi.

d. Rekomendasi treatment : rekomendasi dalam berita tersebut adalah, umat Islam menginginkan pelaku kasus penistaan agama diproses secara adil, dan aksi mereka tidak ingin di kaitkan dengan dugaan makar, kudeta, dan lain sebagainya. Tanpa keberpihakan aparat, melalui konfrontasi yang tidak berguna dan di keluarkan oleh Kapolri sendiri sebagai aparat penegak hukum.

- 2) Republika.co.id menerbitkan berita yang berjudul “DPR Harap Tak Ada Isu Makar Di Aksi 2 Desember” pada tanggal 29 November 2016, tepatnya pukul 06:13 WIB. Dalam berita tersebut berisi 6 paragraf, dan berisi tanggapan DPR dalam isu makar yang tengah ramai di tengah masyarakat. Berikut adalah kutipan berita:

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VIII DPR RI mengapresiasi kesepakatan antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dan Polri terkait aksi Bela Islam III pada 2 Desember 2016. Kesepakatan tersebut menjadi harapan banyak pihak sebagai pengamalan Pancasila dan ajaran Islam yakni musyawarah untuk mufakat. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mengatakan Nabi Muhammad SAW pernah mengibaratkan umat Islam seperti lebah di mana semua tindakannya memberi manfaat kepada masyarakat dan lingkungannya. Namun di sisi lain pendakwah kondang almarhum Zainudin MZ pernah mengatakan umat Islam akan menyengat dengan keras jika dilecehkan dan dilukai. Dengan demikian dia berharap aksi tanggal 2 Desember harus lebih damai dari aksi 4 November. "Tidak ada lagi isu makar, tidak ada lagi upaya adu domba dan konflik antarulama, tidak ada lagi pelarangan pengangkutan demonstran kepada perusahaan angkutan," ujarnya, Senin (28/11) malam.

a. Identifikasi masalah : masalah yang terdapat dalam berita tersebut adalah adanya isu makar, membuat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPFMUI) dan polri membuat sebuah perjanjian atau kesepakatan. Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi harapan masyarakat,

sebagai pengamalan Pancasila dan ajaran agama Islam. Sodik Mudjahid wakil ketua komisi VIII DPR RI tersebut mengatakan bahwa adanya kesepakatan dan musyawarah serta mufakat, di harap pada aksi 2 Desember nanti berjalan dengan damai. Dalam berita tersebut Sodik mengatakan “tidak ada lagi isu makar, tidak ada lagi upaya adu domba dan konflik antar ulama dan tokoh agama, tidak ada lagi pelanggaran pengangkutan demonstran kepada perusahaan angkutan”.

b. Interpretasi kausal : berita tersebut memberitakan bahwa aktor yang menjadi penyebab masalah adalah para pihak tertentu yang mempunyai agenda sendiri, yaitu agenda makar yang dikemas dalam aksi 2 desember atau biasa disebut 212. Selain itu pemberitaan tersebut mempunyai arti bahwa masyarakat muslim di Indonesia menginginkan Ahok menjadi tahana dan mengundurkan diri dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Hal itu merupakan suatu tindakan politik identitas ditengah berjalanya kontestasi Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

c. Evaluasi moral : nilai moral dalam pemberitaan tersebut adalah, dalam suatu isu yang tidak jelas, pemahaman dan tabayun adalah jalan yang harus ditempuh setiap muslim. Dalam hal ini, pengamalan nilai-nilai muslim yang dibawa setiap umat di representasikan dengan baik yaitu, lewat jalan musyawarah dan mufakat. Mencari jalan terbaik serta tidak mengedepankan kemarahan adalah merupakan pilihan bijak dalam menanggapi isu yang tidak benar tersebut sebagai umat Islam.

d. Rekomendasi treatment : rekomendasi dalam berita yang dimuat oleh Republika adalah, jalanya penegakan hukum yang menyangkut kasus dugaan penistaan agama yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Berjalanya kasus tersebut dituntut harus sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dan memberi rasa keadilan untuk masyarakat muslim yang menjalankan aksi dan menuntut hal tersebut. Hal ini dilakukan agar mencegah hal serupa terjadi di lain hari dan mengulangi hal yang sama yang menyakit hati masyarakat muslim.

- 3) Berita yang di terbitkan oleh Republika.co.id yang berjudul “Pengamat: Aksi 411 dan 212 Jadi Sejarah, Isu Makar Terlalu *Lebay*” dimuat pada tanggal 2 Januari 2017, tepatnya pukul 06:13, dalam pemberitaan tersebut pengamat menanggapi isu makar yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan aksi 212. berita tersebut berisi 5 paragraf.

Berikut adalah kutipan berita Republika.co.id
 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan bahwa aksi 4 November 2016 dan aksi 2 Desember 2016 atau 212 menjadi sejarah penting bagi Indonesia. Ia menilai aksi damai tersebut menghabiskan energi yang tidak sedikit tapi mampu didengar dunia.

“Aksi 212 dan 411 menjadi sejarah penting. Semua mata dan telinga dunia juga ikut melihat, menyaksikan dan mendengar mengambil bagian menyaksikan peristiwa aksi damai terbesar sepanjang sejarah” kata pangi dalam rilis yang diterima Republika.co.id ahad (1/1).

a. Identifikasi masalah : dalam berita yang diterbitkan oleh Republika.co.id tersebut, penyikapan tentang isu makar yang diberikan Kapolri saat itu, statement yang diberikan kepada masyarakat luas di nilai terlalu melebihi-lebihkan atau “lebay”.

Penyikapan tentang aksi 2 desember dinilai oleh pengamat politik yaitu syarwi chaniago menggemparkan dunia, dan penyikapan publik tentang isu makar dalam aksi 2 desember terlalu di lebih-lebihkan.

b. Interpretasi kausal : dalam berita tersebut, peristiwa penyikapan publik yang berlebihan disebabkan oleh, statement Kapolri yang mengatakan bahwa aksi 2 Desember 2016 adalah aksi yang ditumpangi sekelompok orang yang ingin mewujudkan keinginanya yaitu makar.

c. Evaluasi moral : penilaian moral dari berita tersebut adalah, penyikapan isu makar yang harus tidak dengan heboh dan panik serta di lebih-lebihkan. Menurut Pangi Syarwi Chaniago, dalam aksi 2

Desember tersebut telah menyita perhatian Indonesia bahkan dunia.

d. Rekomendasi treatment : dalam berita tersebut Republika.co.id merekomendasikan bahwa aksi 2 Desember tersebut tidak semenakutkan tindakan makar, dan kegiatan tersebut justru menyita perhatian dunia.

b. Proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

1) Republika.co.id menerbitkan berita yang berjudul “Peserta Aksi Damai 212: Kasus Penistaan Agama Harus Dituntaskan” dimuat pada jumat, 2 Desember 2016, tepatnya pukul 19:03. Berita yang berisi tentang tuntutan masa tentang penanganan kasus penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Berita ini berisi 6 paragraf, berikut adalah kutipan berita dari Republika.co.id.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Peserta aksi damai bela Islam jilid III atau aksi damai 212 meminta aparat hukum untuk menuntaskan penistaan Islam yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Umat agama Islam tidak meminta macam-macam kepada pemerintah kecuali menghukum individu Penistaan agama.

Fatin Hamam, peserta aksi demo asal Tegal, Jawa Tengah, mengatakan kepastian hukum menjadi harga mati dalam kasus ini. Selama ini, dia melihat aparat tidak serius dalam menangani dugaan penistaan agama yang dilakukan gubernur DKI Jakarta non-aktif itu.

a. Identifikasi masalah : dalam berita yang diterbitkan oleh Republika.co.id, pengunjung rasa menuntut berjalanya hukum dengan tegas. Pengunjung rasa juga menilai bahwa selama ini aparat penegak hukum seperti tidak serius untuk menangani kasus dugaan penistaan agama ini. Kurangnya rasa kepercayaan publik, khususnya umat Islam saat itu yang menggelar aksi untuk menegaskan mereka menuntut berjalanya kasus penistaan agama yang dinilai lamban dalam menjalani proses hukum.

b. Interpretasi kausal : berita yang dimuat Republika.co.id diatas, di dalam berita tersebut

mempunyai penyebab utama ialah, penenganan kasus dugaan penistaan agama yang menjerat gubernur DKI Jakarta non-aktif yaitu Ahok dinilai masa berjalan lambat. Hal ini menegaskan bahwa masa demo menghawatirkan kasus Ahok tidak ditangani dengan benar serta sangat mungkin di hentikan di tengah jalan dalam proses penanganan hukum dugaan penistaan agama Islam.

c. Evaluasi moral : penilaian moral dalam berita tersebut adalah, memberikan semua persoalan hukum kepada pihak berwajib. Proses hukum dengan setransparan mungkin, serta tuntaskan penanganan hukum penistaan agama Islam. Dalam hal ini, adanya keraguan dalam masyarakat khususnya yang menggelar aksi 2 desember 2016, dimana penghentian penanganan rentan dilakukan oleh pihak berwajib.

d. Rekomendasi treatment: pemberitaan tersebut direkomendasikan terhadap, penegak hukum dan masyarakat, untuk menjalankan kewenangan sebaik mungkin dan bertindak adil, serta masyarakat yang mengawasi berjalanya penangan kasus dugaan penistaan agama Islam. Dalam hal ini harapan dapat dituntaskannya kasus Ahok dapat diberlangsungkan tidak lama serta bertele-tele. Karena kekhawatiran masa aksi terhadap proses hukum yang memakan waktu akan berpotensi penenggelaman kasus atau dihentikannya proses hukum terhadap tersangka.

- 2) Pada tanggal 2 Desember tepatnya di hari jumat pukul 22:14 WIB, republika.co.id menerbitkan berita yang berjudul “GNPF MUI : kami harap Ahok bisa ditahan” berita yang berisi 6 paragraf berisi tentang tuntutan GNPFMUI penahanan Ahok dalam kasus penistaan agama.

Berikut kutipan berita Republika.co.id

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerakan Pengawal Fatwa (GNPF) MUI berharap kejaksnaan bisa segera menyatakan berkas lengkap kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan melimpahkannya ke pengadilan. GNPF- MUI pun berharap Ahok ditahan atas kasus penistaan agama.

“Dengan semakin yakinya kejaksan ada pelanggaran terhadap hukum pidana, kami berharap Basuki Tjahaja Purnama bisa ditahan dan kasusnya dilimpahkan ke pengadilan”, kata wakil ketua GNPF-MUI, Zaitun Rasmin, di Jakarta, Jumat (12/2). Zaitun menekankan kasus Ahok ini harus dikawal. Sebab, publik harus tau kasus penistaan agama oleh Ahok ini merupakan kasus besa. “proses pengadilanya juga kita kawal dengan sebaik-baiknya,” tutur Zaitun.

a. Identifikasi masalah : dalam berita yang dimuat oleh Republika, terdapat masalah utama dalam berita tersebut yaitu,

GNPF-MUI meminta agar kejelasan hukum bagi kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok segera di proses ke pengadilan. Tingkat kepercayaan terkait kasus ini kepada aparat yang kurang, turut melatar belakangi aksi 212 tersebut, hal ini menjadikan tuntutan tersebut dibawa masa dan menjadi salah satu tuntutan utama dalam aksi tersebut.

b. Intepretasi kausal : peristiwa dalam berita tersebut disebabkan oleh, ketidak percayaan masa aksi terhadap aparat yang menjalankan hukum. Masa aksi menginginkan berkas kasus Ahok segera diserahkan kepada pengadilan, menurut Zaitun Rasman wakil ketua GNPF-MUI, Basuki Tjahaja Purnama sudah jelas melanggar dan pantas untuk di pidanakan. Dengan itu proses hukum Ahok di harap bisa segera di jalankan.

c. Evaluasi moral : penilaian moral dalam pemeberitaan tersebut adalah, adanya tuntutan dalam aksi 2 Desember 2016 tersebut, dimana masa aksi menginginkan proses hukum Ahok adalah pelanggaran hukum yang serius dan harus segera pelanggarnya yaitu Ahok dapat ditahan dan segera di proses oleh pengadilan.

d. Rekomendasi treatment : dalam berita tersebut Republika berusaha memframe bahwa masa sangat menginginkan Ahok untuk ditahan dan berjalan kasus walaupun dalam berjalanya kontestasi Pilkada DKI yang akan digelar bulan depan. Hal ini

merupakan politik identitas, dimana pembetulan masalah agama kepada masalah Pilkada. Keinginan masa yang menggelar aksi tersebut yaitu Ahok dapat ditahan sebelum Pilkada berlangsung hal ini mengindikasikan bahwa Ahok akan kehilangan suara umat sebagian Muslim DKI.

- 3) Republika.co.id menerbitkan berita yang berjudul “Pasca 212, Umat Diminta Tetap Kawal Kasus Ahok” berita yang dimuat pada tanggal 4 Desember 2016 tepat nya pukul 19:32 tersebut, berisi tentang himbauan untuk masa 2 Desember untuk tetap mengawasi berjalanya kasus Ahok walaupun aksi 2 Desember telah usai. Berita yang berisi 11 paragraf tersebut berisi klarifikasi tokoh agama yang meluruskan tuduhan aksi tersebut adalah aksi bayaran. Berikut adalah kutipan berita Republika.co.id
- REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Usai Aksi Bela Islam III pada Jumat (2/12), umat Islam diminta tetap mengawal kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ruang dialog bagi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF) dan pemerintah juga tetap terbuka untuk bisa dimasuki. Ketua Dewan Penasihat GNPF, Habib Rizieq Syihab meminta setelah Aksi Bela Islam III, umat Islam tetap mengawal kasus Ahok dengan ketat, jangan sampai lalai. Pihaknya mendapat kabar salah satu jaksa yang mewakili pihak penuntut adalah seorang Nasrani. Hal itu sedang ditelusuri.

a. Identifikasi masalah : kasus yang melatar belakangi terjadinya Aksi Bela Islam adalah, kasus penistaan agama yang menjadikan gubernur DKI Jakarta non-aktif yaitu Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka. Ketua Dewan Penasihat GNPF, Habib Rizieq Syihab meminta untuk tetap mengawasi berjalanya kasus tersebut. Dugaan bahwa jaksa penuntut dalam pengadilan adalah seorang Nasrani juga menjadi sorotan. Hal itu menjadikan ketidakpercayaan masyarakat yang menggelar aksi 2 Desember kepada aparaturnegara semakin tinggi.

Habib rizieq juga menyangkal adanya aksi tersebut adalah aksi bayaran elit politik tertentu.

b. Interpretasi kausal : berita yang dimuat oleh Republika.co.id tersebut, dimana yang menjadi penyebab masalah adalah tudingan-tudingan pihak tertentu yan tidak benar adanya, serta isu-isu yang sengaja dibuat agar melemahkan sebagian masyarakat yang menggelar aksi tersebut. Kecurigaan-kecurigaan terkait berjalanya proses hukum Ahok juga menjadi penyebab permasalahan utama dalam berita tersebut.

c. Evaluasi moral : dalam pemberitaan tersebut nilai moral yang ada di dalamnya ialah, kecurigaan-kecurigaan tentang berjalanya proses hukum Ahok, dan isu-isu yang dilontarkan elit-elit politik tertentu untuk memecah suara umat Islam khususnya di DKI Jakarta, serta kurangnya kepercayaan terhadap aparaturnya yang menangani hukum Ahok.

d. Rekomendasi treatment : dalam berita tersebut, Republika.co.id merekomendasikan pengawalan dari umat Islam diperlukan dalam berjalanya proses hukum Ahok tersebut, agar tercapai keadilan dan tidak memicu isu-isu yang tidak diinginkan secara berulang.

c. Penyikapan elit politik dan organisasi massa tentang Pilkada DKI Jakarta

- 1) Republika.co.id menerbitkan berita yang berjudul “Amien Rais: Kekuatan Islam tak Boleh Kalah di Pilkada” berita yang dimuat dalam halaman web Republika tersebut diterbitkan pada, 15 Januari 2017, tepatnya pada hari ahad, pukul 09:20. Berita tersebut berisi tentang pendapat Amien Rais tentang Pilkada DKI Jakarta, yang dimana menurutnya kekuatan atau dominasi umat Islam tidak boleh kalah di Pilkada. Berita yang berisi 6 paragraf tersebut berisi tentang, Pilkada yang akan digelar pada 15 Februari mendatang menjadi sorotan Amien Rais untuk mengingatkan umat Islam di DKI Jakarta agar tak boleh kalah dalam kontestasi Pilkada tersebut. Berikut adalah kutipan berita Republika.co.id

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua MPR Amien Rais kembali mengingatkan umat Islam khususnya di Jakarta agar semangat kekuatan Islam yang kini muncul setelah dua aksi besar tahun lalu, agar tidak padam dan 'melempem'. Salah satu penguatnya adalah pengingat bahwa umat Islam di Jakarta tidak boleh kalah di Pilkada DKI, 15 Februari mendatang.

"Sering orang mengatakan **Pilkada DKI** nanti serasa Pilpres bahkan lebih menegangkan dan lebih serius. Karena di DKI ini penduduk Muslimnya 85 persen, untuk itu umat Islam jangan mau kalah di Pilkada nanti," kata Amien dalam acara Tabligh Akbar Politik Islam sekaligus Shalat Shubuh berjamaah di Masjid Agung Al Azhar, Jakarta Selatan, Ahad (15/1).

a. Identifikasi masalah : dalam berita tersebut terdapat masalah yaitu ajakan seakan pertarungan berlebelkan agama menjadi suatu masalah, dimana yang dihadapi masyarakat DKI Jakarta hanya Pilkada yang berulang setiap 5 tahun sekali. Ajakan untuk masyarakat muslim di nilai sebagai politik identitas yang dijalankan para elit politik.

b. Interpretasi kausal : Republika.co.id menerapkan bingkai dalam berita tersebut, ajakan dalam memilih suatu calon tertentu yang menjadi salah satu ciri politik identitas yang membawa nama kelompok agama tertentu menjadi akar dari masalah. Mengingat bahwa dalam Pilkada umat Islam di Jakarta tidak solid menuju hari pemilihan Amien Rais mengingatkan bahwa umat Islam di DKI Jakarta tidak boleh kalah.

c. Evaluasi moral : dalam berita tersebut mempunyai nilai moral, ajakan untuk umat Islam agar tidak boleh kalah dengan golongan agama tertentu, serta menjadikan Pilkada DKI Jakarta sebagai tolok ukur untuk pemilihan Presiden .

d. Rekomendasi treatment : dalam berita yang diterbitkan oleh Republika .co.id, terhadap ajakan tersebut umat Islam di ingatkan agar tetap solid dan tidak kalah dengan dukungan dari golongan agama tertentu, dan calon dari agama tertentu.

- 2) Republika.co.id menerbitkan berita pada 15 januari 2017 tepatnya hari ahad pukul 09:40 WIB, berita tersebut berjudul “Memilih Pemimpin Seiman Tak Melanggar Demokrasi” berita yang berisi 5 paragraf tersebut berisi tentang, *statement* ustaz Bachtiar Nasir dalam acara Tabligh Akbar Politik Islam.

Berikut adalah kutipan bertia Republika.co.id
 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usai melaksanakan shalat Shubuh berjamaah, ribuan orang masih memenuhi halaman Masjid Al-Azhar untuk mengikuti rangkaian acara Tabligh Akbar Politik Islam. Dalam kesempatan tersebut Ustaz **Bachtiar Nasir** memberikan tausiyahnya kepada para peserta tabligh akbar. "Hari ini ada pengajian politik Islam yang sudah berjalan sejak 2013," kata Ustaz Bachtiar usai memberikan tausiyah di acara Tabligh Akbar Politik Islam kepada **Republika.co.id**, Ahad (15/1). Bachtiar mengatakan, pengajian politik Islam adalah lembaga strategis untuk mempertemukan umat Islam dengan calon pemimpinnya. Kegiatan ini juga merupakan lembaga kajian dan musyawarah antara umat dan tokoh umatnya.

a. Identifikasi masalah : memilih pemimpin yang seiman tidak dilarang oleh Undang-Undang negara, hal tersebut disampaikan oleh ustaz Bachtiar Nasir. Dalam berita tersebut GNPf MUI tidak menyebut secara spesifik siapa yang akan dipilih dari dua calon muslim di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Umat muslim diajak untuk memilih pemimpin dari yang beragama Islam pula.

b. Interpretasi kausal : dalam berita tersebut penyebab permasalahan adalah umat Islam yang tidak boleh memilih calon pemimpin yang berbeda dengan mereka, secara keyakinan. Ustaz Bachtiar Nasir, juga membebaskan pilihan umat Islam DKI Jakarta memilih diantara dua pasangan calon yang notabnya beragama Islam. Hal ini merupakan suatu politik identitas yang dilakukan suatu elit politik untuk mendapatkan suara dari golongan, ras, atau agama tertentu.

c. Evaluasi moral : dalam berita tersebut terdapat nilai moral, memilih pemimpin sesuai keyakinan tidak dilarang oleh undang-undang, memilih calon tertentu yang beragama sama seperti pemilihnya adalah kebebasan. Ajakan untuk harus memilih calon tertentu yang mengatas namakan agama adalah hal yang tidak etis dalam berpolitik, hal ini biasa disebut juga dengan politik identitas.

d. Rekomendasi treatment : berita yang dimuat oleh Republika.co.id tersebut memiliki rekomendasi, memilih calon dengan *background* agama tertentu adalah bebas, hal itu tidak dilarang maupun dianggap kesalahan oleh undang-undang dalam berdemokrasi. Hal ini menjadi politik identitas dimana mengajak memilih pasangan calon tertentu dan tidak memilih pasangan calon tertentu hanya karena mempunyai *background* agama yang berbeda.

- 3) Republika.co.id memuat sebuah berita yang berjudul “Umat Islam Kalah Di Pilkada DKI, Sulit Pertahankan Kedaulatan.” Berita tersebut dimuat pada tanggal 15 Januari 2017, tepatnya hari Ahad pukul 16:20 WIB. Berita tersebut berisi tentang persepsi mantan ketua MPR Amien Rais terhadap keberlangsungan umat Islam di Jakarta saat pemimpin yang terpilih tidak dari golongan yang beragama Islam.

Berikut adalah kutipan berita Republika.co.id
 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mantan Ketua MPR Amien Rais menyebut ancaman terhadap Indonesia saat ini di titik paling kritis. Jika umat Islam kalah di Pilkada DKI, akan lebih berat mempertahankan kedaulatan politik ekonomi dan hankam.

Kondisi ini, menurut Amien, karena di negeri ini ada boneka-boneka politik dan ekonomi. Amien melihat selama ini Ahok seolah-olah bekerja tapi sebenarnya melayani kepentingan pengusaha besar yang ingin menguasai Jakarta dan Indonesia.

Terbukti beberapa kasus mantan bupati Belitung Timur itu mengabaikan nasib kaum mustadhafin demi kebijakan pengembang di Jakarta. "Mereka

akan mengambil kedaulatan ekonomi negara ini," ujarnya.

a. Identifikasi Masalah : dalam berita tersebut Amien Rais berpendapat, di mana Indonesia untuk saat ini di titik paling kritis, bila umat Islam tidak bisa memenangkan kontestasi Pilkada tersebut. Amien Rais juga memaparkan bahwa Ahok adalah Gubernur boneka, dalam hal seperti *statement* tersebut di ceritakan jelas dalam ranah politik identitas.

b. Inteptrasi kausal : dalam pemberitaan tersebut, penyebab permasalahan adalah Ahok yang di anggap Amien Rais sebagai gubernur boneka, hal ini dibuktikan Amien Rais dalam argumennya terhadap kasus mantan bupati belitung timur. Dalam kasus tersebut, kaum mustadhafin yang diabaikan demi pengembang di Jakarta. Amien Rais juga mengeluarkan *statement*, jika umat Islam kalah dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Hal ini menyebabkan kekhawatiran Amien terhadap kondisi Indonesia yang sedang dalam kondisi kritis dalam sektor ekonomi dan kunham.

c. Evaluasi moral : nilai moral yang terdapat pada berita tersebut adalah, *statement* yang dikeluarkan Amien Rais menjadi salah satu *statement* elit politik yang berpengaruh. Dalam mengeluarkan pendapat, mantak ketua MPR yaitu Amien Rais juga memiliki pendukung atau masa di masyarakat yang tidak sedikit. Hal ini menjadi presepsi yang diberikan perhatian lebih dari masyarakat dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta tersebut.

d. Rekomendasi Treatment : berita tersebut menjadikan umat Islam di DKI Jakarta seakan menjadi kunci kemakmuran Indonesia. Kemenangan umat Islam yang disebut Amien Rais, di dalam kontestasi Pilkada DKI, menjadi suatu penentu keberlangsungan politik, dan ekonomi Indonesia kelak. Menurutnya umat Islam di DKI Jakarta adalah kunci keberlangsungan kedudukan umat Islam di dalam dunia politik di Indonesia.

D. Pembahasan hasil penelitian

Latar belakang waktu penelitian yang diambil adalah tiga bulan menjelang Pilkada berlangsung, mengingat pada bulan November 2016 sampai Januari 2017 menjadi bulan yang menentukan kemana suara masyarakat akan berlabuh. Pada tiga bulan penelitian Kompas.com lebih memberitakan tentang sikap elit politik pemerintah yang merespon tentang jalannya Pilkada DKI. Sedangkan Republika lebih memberitakan hal yang lebih menitik beratkan kepada pergerakan umat serta respon umat Islam dalam menyikapi isu-isu yang dilemparkan elit kepada mereka.

a. Framing dan politik identitas Kompas.com

Dari keseluruhan hasil analisis *framing* pemberitaan Republika dan Kompas.com, peneliti menemukan sebuah kekurangan dalam berita yang dimuat Kompas.com. Kurang memenuhi syarat 5W+1H di mana pada judul berita Gerakan pengawal fatwa MUI : selama ini tersangka penistaan agama selalu ditahan, yang dimuat pada tanggal 16 November 2016.

Secara tema berita Kompas.com lebih banyak menggunakan koherensi kontras untuk menjelaskan antar kalimat yang berlawanan. Penggunaan istilah tertentu dan foto dalam struktur retorik juga tampak dalam setiap beritanya. Kompas.com lebih menonjolkan isu dengan tema demo aksi 212, sikap Jokowi tentang demo 212, dan sikap para calon menjelang Pilkada .

Secara struktur Kompas.com menerbitkan artikel berita yang berjudul “Gerakan pengawal fatwa MUI : selama ini tersangka penistaan agama selalu ditahan” berita yang dimuat pada tanggal 18 November 2016, pukul 12:20 tersebut berisi 9 paragraf, menurut munarman yang berstatus sebagai Panglima Lapangan GNPf MUI para pelanggar hukum kasus pasal 156 a seharusnya ditahan karena dirasa Ahok dapat menghilangkan barang bukti.

“selama ini tersangka yang terkait pada pasal 156 a selalu ditahan, seperti kasus Arswendo, Lia Aminuddin, Yusman Roy, Ahmad Musadeq”. (paragraf ketiga). Pada penutup berita Kompas.com menyarankan bahwa setiap proses hukum sebaiknya diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Hal ini memperjelas posisi Kompas.com dalam memuat sebuah berita yang menitik beratkan kepada penyerahan otoritas hukum kepada pihak yang berwenang. Politik identitas tidak selalu berhubungan dengan ras, suku dan agama, politik identitas juga berhubungan dengan kefanatikan terhadap negara.

Framing media dan politik identitas tentu saling berhubungan. Teori politik identitas yang dikemukakan oleh Klaus Von Beyme mempunyai 3 agenda besar dalam politik yaitu : membangun kembali narasi besar yang prinsipnya ditolak, mempunyai tendensi untuk membangun sistem *apartheid*, upaya menciptakan kelompok yang spesifik dari ilmu.

Membangun agenda besar dalam ranah politik daerah maupun nasional, membutuhkan media penyebaran yang masif dan cepat. Hal tersebut dapat diperoleh dari kerja media yang sekarang merambah pada media berita yang berbasis *online*.¹

b. Framing politik identitas Republika.co.id

Hasil analisis *framing* menunjukkan, bahwa adanya perbedaan dalam pembingkaiian berita dari masing-masing portal berita *online*. di berita Kompas.com memposisikan dalam berita yang terkesan berimbang dan netral, sedangkan Republika.co.id lebih menitik beratkan pemuatan beritanya kepada subjektifitas umat Islam. Pembingkaiian berita yang subjektifitas kepada umat Islam adalah berita yang berjudul Amien Rais :Kekuatan Islam Tak Boleh Kalah Di Pilkada. Cara wartawan menggambarkan pendefinisian masalah, sumber masalah, keputusan moral, dan penyelesaian, dalam berita tersebut mengangkat Amien Rais yang beropini bahwa umat Islam harus menang dalam pemilihan kepala daerah.

Contoh keberpihakan berita “amien rais kembali mengingatkan umat Islam”..... (paragraf pertama) “semangat umat islam agar tidak melempem salah satu pengingatnya adalah dua aksi besar di tahun 2016.”..... (paragraf kedua). Berita yang ber *headline* Amien Rais :Kekuatan Islam Tak Boleh Kalah Di Pilkada. Merupakan berita yang di muat oleh Republika pada tanggal 15 Januari 2017. Berita tersebut mempunyai pernyataan, sering orang mengatakan Pilkada DKI nanti serasa Pilpres bahkan lebih menegangkan. Karena DKI ini penduduk muslimnya 85% untuk itu umat Islam tidak boleh kalah di Pilkada nanti..... (paragraf ke enam).

Pernyataan tersebut merupakan politik identitas, hal tersebut di perjelas dengan teori yang ada dalam karya Muhtar Abodin yang mengatakan bahwa pengaktualisasian penerapan identitas pada seseorang dapat mencerminkan atau mewakili dirinya sendiri maupun kelompok dalam konteks entitas dapat terbentuk suatu identitas seperti

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).

jawa, tionghoa, madura, bali, dan sebagainya, dalam lingkup keagamaan ada Islam, budha, kristen, konghuchu, dan katholik.²

Berita tersebut di tutup dengan pernyataan Amien serta latar informasi tersebut diperoleh yaitu dari acara, Tabligh Akbar di Masjid Al-Azhar Jakarta selatan.

Dari awal berita pemuatan ini menunjukkan bahwa berita perbihak atau bisa di katakan subjektif dalam memberitakan suatu berita yang berdampak kepada kesimpulan bahwa Republika menjalankan subjektifitas.

3. Perbandingan *Framing* pemberitaan Pilkada DKI Jakarta pada Kompas.com dan Republika.co.id.

Pemberitaan yang di terbitkan oleh Republika serta Kompas.com, masing-masing mempunyai isu yang menjadi tonjolan dalam berita tersebut. Pada Kompas.com terdapat 33 berita yang berkaitan dengan Pilkada DKI tahun 2017. Di dalam penelitian 33 berita tersebut terdapat 3 isu yang lebih ditonjolkan dibandingkan isu yang lainnya. Tiga isu tersebut diniali menonjol dari isu yang lain karena ketiga isu tersebut terdapat pengulangan informasi. Ketiga isu tersebut adalah : a) pemberitaan tanggapan organisasi massa dan elit politik tentang aksi 212 dan unjuk rasa penahanan Ahok, b) pemberitaan tentang sikap presiden Jokowi pada demo 212, c) Frame Penyikapan pasangan calon gubernur dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017.

Republika sendiri mempunyai 33 berita pula yang keseluruhan beritanya berisi tentang Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Penelitian ini dilakukan 3 bulan disaat menjelang pemilihan Gubernur pada bulan Februari 2017. Tiga bulan tersebut juga di nilai paling berpotensi terdapat politik identitas melalui media elektronik dalam proses menuju pemilihan. Dalam penelitian selama tiga bulan pemuatan berita terdapat peristiwa- peristiwa penting yang berkaitan dengan Pilkada DKI Jakarta, aksi damai 2 Desember 2016, debat kandidat gubernur dan wakil gubernur, survei, dan sebagainya. Dalam pemberitaannya Republika.co.id menonjolkan tiga isu dimana tiga isu tersebut adalah : a) Isu makar yang terdapat pada aksi 212 yang terjadi di tengah berlangsungnya kontestasi Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. b) proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.c) penyikapan elit politik dan organisasi massa tentang Pilkada DKI Jakarta.

² Ali Thaufan DS and Dedi Sutiadi, 'Partisipasi Politik Umat Islam Dalam Aksi Massa 212 Dan Implikasinya Terhadap Wajah Islam Indonesia', *Ilmu Ushuluddin*, volume 7.No 2 (2020), 127–50.

Berikut adalah tabel perbandingan tema dan judul berita Kompas.com dan Republika.co.id :

Judul Berita	Tema Berita Kompas.com	Judul berita	Tema berita Republika.co.id	
Gerakan pengawal fatwa MUI : selama ini tersangka penistaan agama selalu ditahan	Pemberitaan tanggapan organisasi massa dan elit politik tentang aksi 212 dan unjuk rasa penahanan Ahok	Pengamat : Isu Makar Di Umngkap Untuk Gagalkan Aksi 2 Desember	Isu makar yang terdapat pada aksi 212 yang terjadi di tengah berlangsungnya kontestasi Pilkada DKI Jakarta tahun 2017	
Menko Polhukam Minta Massa Doa Bersama Tunggu Proses Ahok		DPR Harap Tak Ada Isu Makar Di Aksi 2 Desember		
Anies: Kejadian 212 Itu Sudah Mengagumkan Dunia		Pengamat: Aksi 411 dan 212 Jadi Sejarah, Isu Makar Terlalu <i>Lebay</i>		
Dari Payung Hingga Sandal, Apa Makna Biru Bagi Jokowi?		Peserta Aksi Damai 212: Kasus Penistaan Agama Harus Dituntaskan		Proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
Jokowi : Siapa Bilang Ada Demo 2 Desember? Yang Ada Doa Bersama		GNPF MUI : kami harap Ahok bisa ditahan		
Cerita Jokowi “Ngotot” Shalat Jumat Bersama Massa Pada Aksi 212		Pasca 212, Umat Diminta Tetap Kawal Kasus Ahok		

Judul Berita	Tema Berita Kompas.com	Judul berita	Tema berita Republika.co.id
Ahok : Bapak ibu Doakan “Mulut Comberan” Saya Tidak Keluar	Frame Penyikapan pasangan calon gubernur dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017.	Amien Rais: Kekuatan Islam tak Boleh Kalah di Pilkada	Penyikapan elit politik dan organisasi massa tentang Pilkada DKI Jakarta
Djarot: Kalau Takut Coblos Ahok, Coblos yang di sebelahnya		Memilih Pemimpin Seiman Tak Melanggar Demokrasi	
Sandiaga Mengaku Tak Niat Menyerang Saat Bertanya Soal Ahok Ke Sylvi		Umat Islam Kalah Di Pilkada DKI, Sulit Pertahankan Kedaulatan	